

Integrasi Literasi Digital dalam Pembelajaran PPKn untuk Pembentukan Digital Citizenship di Era Society 5.0

Agung Supriyanto

Universitas Wisnuwardhana, Jl. Danau Sentani 99 Malang

Email: agungsupriyanto2306@gmail.com

Abstrak

Transformasi pendidikan pada era Society 5.0 menuntut penguatan literasi digital sebagai fondasi pembentukan karakter kewargaan digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi literasi digital dalam pembelajaran PPKn serta implikasinya terhadap pembentukan digital citizenship peserta didik di SMK Telkom Malang sebagai sekolah vokasi berbasis teknologi informasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin kredibilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi digital diterapkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi melalui pemanfaatan platform berbasis kecerdasan artifisial, diskusi isu kewargaan digital, serta proyek reflektif berbasis media digital. Praktik tersebut berkontribusi terhadap penguatan etika bermedia, kemampuan berpikir kritis, partisipasi digital konstruktif, dan kesadaran hukum peserta didik. Penelitian ini menegaskan kebaruan berupa model integratif literasi digital berbasis nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn yang relevan dengan konteks Society 5.0.

Keywords: Digital citizenship, Literasi digital, Pembelajaran berbasis AI, PPKn, Society 5.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era Revolusi Industri 4.0 yang bertransformasi menuju Society 5.0 telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat. Konsep Society 5.0 yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang menekankan integrasi antara ruang fisik dan ruang siber melalui pemanfaatan kecerdasan buatan, big data, dan internet of things untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Fukuyama, 2018). Dalam konteks tersebut, warga negara dituntut memiliki kapasitas literasi digital agar mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam ruang publik digital.

Di Indonesia, peningkatan akses internet yang signifikan dalam satu dekade terakhir telah memperluas partisipasi masyarakat dalam ruang digital. Namun, peningkatan akses tersebut tidak selalu diiringi dengan kualitas kompetensi yang memadai. Fenomena penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi politik, serta rendahnya etika bermedia menunjukkan bahwa dimensi kewargaan digital belum terbentuk secara optimal (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023; UNESCO, 2021). Padahal, kewargaan digital tidak hanya mencakup aspek teknis penggunaan perangkat, tetapi juga tanggung jawab, partisipasi demokratis, dan kesadaran hukum dalam ruang siber (Ribble, 2015; Choi, 2016).

Oleh karena itu, penguatannya menjadi agenda strategis dalam pendidikan nasional.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki mandat normatif dan pedagogis untuk membentuk warga negara yang cerdas, partisipatif, dan berkarakter sesuai nilai Pancasila dan konstitusi. Secara teoretis, PPKn berperan mengembangkan civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions (Print & Lange, 2013). Tantangan Society 5.0 menuntut perluasan orientasi PPKn ke ranah kewargan digital melalui integrasi kemampuan mengakses, mengevaluasi, memproduksi, dan merefleksikan informasi secara kritis dan etis dalam proses pembelajaran (Ng, 2012; UNESCO, 2018).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa integrasi kemampuan tersebut dalam pembelajaran berkontribusi terhadap peningkatan berpikir kritis, kesadaran etika digital, dan partisipasi sosial peserta didik (Fraillon et al., 2019; Oberle et al., 2020). Choi (2016) menegaskan adanya korelasi antara kompetensi digital yang komprehensif dan penguatan kewargan digital. Namun, dalam konteks Indonesia, kajian yang secara spesifik menganalisis integrasi pedagogisnya dalam mata pelajaran PPKn masih terbatas. Penelitian yang ada cenderung membahas literasi digital secara umum atau penggunaan teknologi pembelajaran tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan pembentukan karakter kewargan digital berbasis nilai Pancasila (Kurnia & Astuti, 2017; Sari et al., 2022).

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian pada aspek integratif,

yakni belum optimalnya kajian yang menganalisis secara komprehensif bagaimana integrasi tersebut dirancang dan diimplementasikan dalam pembelajaran PPKn untuk memperkuat dimensi pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kewargan digital. Padahal, secara konseptual PPKn memiliki landasan normatif yang kuat untuk menginternalisasikan nilai tanggung jawab, toleransi, partisipasi demokratis, dan kesadaran hukum dalam ruang digital.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan merumuskan model integrasi yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga berlandaskan nilai Pancasila sebagai fondasi etika digital. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional yang menekankan penguatan Profil Pelajar Pancasila dan kompetensi abad ke-21.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana integrasi literasi digital dirancang dan diimplementasikan dalam pembelajaran PPKn pada era Society 5.0?, 2) Bagaimana integrasi tersebut berkontribusi terhadap pembentukan dimensi pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kewargan digital peserta didik?, 3) Praktik pedagogis apa yang relevan untuk memperkuat karakter kewargan digital berbasis nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn?

Secara teoretis, penelitian ini bertolak dari kerangka digital citizenship (Choi, 2016; Ribble, 2015) dan literasi digital (Ng, 2012; UNESCO, 2018), yang dipadukan dengan paradigma pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai (Print & Lange, 2013). Kebaruan penelitian ini terletak pada

pendekatan integratif antara kemampuan literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai Pancasila dalam konteks transformasi Society 5.0, yang masih terbatas dikaji secara empiris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks pembentukan digital citizenship pada era Society 5.0. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berorientasi pada pengungkapan proses, praktik pedagogis, serta konstruksi makna yang dibangun oleh subjek penelitian dalam situasi pembelajaran berbasis digital.

Penelitian dilaksanakan di SMK Telkom Malang (The Real Informatics School), sebuah sekolah menengah kejuruan berbasis teknologi informasi yang secara konsisten mengembangkan ekosistem pembelajaran digital. Sekolah ini memanfaatkan platform MoLeCul (Moklet Learning Culture) berbasis kecerdasan artifisial sebagai pendamping pembelajaran serta terlibat dalam program Merkle Innovation Core. Karakteristik tersebut menjadikan sekolah ini relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji integrasi literasi digital dalam pembelajaran PPKn. Ruang lingkup penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran PPKn yang memanfaatkan perangkat dan platform digital sekolah.

Subjek penelitian terdiri atas 1 (satu) orang guru PPKn dan 12 (dua belas) peserta didik kelas XI yang terlibat aktif dalam pembelajaran berbasis digital. Penentuan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam penggunaan platform MoLeCul serta partisipasi dalam aktivitas pembelajaran yang memuat isu-isu kewarganegaraan digital. Objek penelitian adalah praktik integrasi literasi digital dalam pembelajaran PPKn serta implikasinya terhadap pembentukan dimensi digital citizenship peserta didik.

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yakni Maret hingga Juni 2025. Rentang waktu tersebut mencakup tahap persiapan instrumen, pengumpulan data di lapangan, analisis data awal, hingga verifikasi temuan. Durasi ini dipandang memadai untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai dinamika integrasi literasi digital dalam proses pembelajaran.

Data penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif terbatas, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi pola integrasi literasi digital dalam aktivitas pembelajaran, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial sebagai sumber belajar dan media refleksi. Wawancara mendalam dilakukan kepada guru dan peserta didik guna menggali persepsi, pengalaman, serta pemaknaan mereka terhadap praktik kewarganegaraan digital yang berkembang dalam pembelajaran. Studi dokumentasi meliputi analisis modul ajar, perangkat pembelajaran digital, kebijakan sekolah, serta hasil karya peserta didik. Keabsahan data dijamin melalui

triangulasi sumber dan triangulasi teknik, disertai konfirmasi temuan kepada informan (member checking) untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Secara operasional, integrasi literasi digital dimaknai sebagai proses sistematis memasukkan kompetensi akses, analisis, evaluasi, produksi, dan refleksi informasi digital ke dalam pembelajaran PPKn. Digital citizenship didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi digital secara etis, kritis, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan norma hukum. Indikator yang diamati meliputi kesadaran etika bermedia, kemampuan verifikasi informasi, partisipasi konstruktif dalam ruang digital, serta kepatuhan terhadap regulasi siber.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data berdasarkan tema integrasi literasi digital dan dimensi kewargan digital. Penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks, deskripsi naratif, dan pemetaan tematik untuk memudahkan penelusuran pola. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara reflektif dan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung hingga diperoleh temuan yang kredibel, konsisten, dan kontekstual sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menganalisis bentuk

integrasi literasi digital dalam pembelajaran PPKn serta implikasinya terhadap pembentukan digital citizenship peserta didik di SMK Telkom Malang.

1. Bentuk Integrasi Literasi Digital dalam Pembelajaran PPKn

Temuan menunjukkan bahwa integrasi literasi digital berlangsung secara sistematis pada tiga tahap pembelajaran: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tabel 1. Bentuk Integrasi Literasi Digital dalam Pembelajaran PPKn

Tahap Pembelajaran	Bentuk Integrasi Literasi Digital	Implementasi di Kelas
Perencanaan	Integrasi sumber digital dan AI	Modul ajar memuat penggunaan MoLeCul dan sumber daring terverifikasi
Pelaksanaan	Diskusi isu kewargan digital berbasis kasus aktual	Analisis hoaks, etika bermedia, dan regulasi ITE
Evaluasi	Refleksi digital dan proyek berbasis media	Pembuatan konten kampanye literasi digital

Berdasarkan Tabel 1, integrasi literasi digital tidak bersifat insidental, melainkan dirancang secara terstruktur dalam perangkat pembelajaran hingga tahap penilaian. Pada tahap perencanaan, guru secara eksplisit memasukkan indikator kemampuan verifikasi informasi dan etika komunikasi digital ke dalam modul ajar. Seorang guru menyatakan, “Setiap materi PPKn sekarang saya hubungkan dengan konteks digital. Anak-anak tidak hanya memahami norma, tetapi juga bagaimana menerapkannya saat berinteraksi di media sosial.”

Pada tahap pelaksanaan, pembelajaran difokuskan pada analisis isu aktual seperti hoaks politik, ujaran kebencian, dan

perlindungan data pribadi. Diskusi berlangsung secara argumentatif dengan merujuk pada sumber yang diverifikasi. Salah satu peserta didik menyampaikan, “Kami diminta mengecek dulu kebenaran berita sebelum membahasnya. Kalau sumbernya tidak jelas, tidak boleh langsung dipercaya.”

Pada tahap evaluasi, peserta didik menghasilkan proyek kampanye literasi digital melalui media sosial sekolah. Produk yang dihasilkan tidak hanya dinilai dari aspek teknis, tetapi juga konsistensi pesan etika dan tanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi literasi digital telah menyentuh dimensi konseptual, praktis, sekaligus reflektif dalam pembelajaran PPKn.

2. Dimensi Digital Citizenship yang Terbentuk

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan empat dimensi utama digital citizenship yang berkembang pada peserta didik.

Tabel 2. Dimensi Digital Citizenship Peserta Didik

Dimensi	Indikator Perilaku yang Teramati
Etika Digital	Menghindari ujaran kebencian, menggunakan bahasa santun
Berpikir Kritis	Memverifikasi sumber sebelum membagikan informasi
Partisipasi Digital	Terlibat dalam diskusi isu publik secara konstruktif
Kesadaran Hukum	Memahami konsekuensi pelanggaran UU ITE

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pembentukan kewargaan digital tercermin dalam perubahan perilaku dan pola berpikir peserta didik. Dimensi etika digital tampak dari penggunaan bahasa yang lebih santun dalam forum diskusi daring kelas. Seorang peserta didik mengungkapkan, “Sekarang

kalau komentar di media sosial lebih hati-hati, takut menyinggung atau melanggar aturan.”

Dimensi berpikir kritis terlihat dari kebiasaan melakukan verifikasi sumber sebelum menyebarkan informasi. Praktik ini diperkuat melalui tugas analisis berita yang mensyaratkan pencantuman referensi kredibel.

Partisipasi digital berkembang melalui keterlibatan aktif dalam diskusi isu publik secara argumentatif dan berbasis data. Sementara itu, kesadaran hukum tercermin dari pemahaman peserta didik mengenai implikasi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seorang siswa menyatakan, “Kami jadi tahu kalau menyebarkan hoaks bisa ada konsekuensi hukumnya, jadi harus lebih bertanggung jawab.”

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran PPKn berimplikasi pada penguatan dimensi etika, kognitif, partisipatif, dan normatif kewargaan digital peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran PPKn di SMK Telkom Malang berlangsung secara komprehensif pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Integrasi tersebut tidak berhenti pada penggunaan teknologi sebagai media, melainkan mengarah pada pembentukan kapasitas berpikir kritis, kesadaran etis, dan tanggung jawab hukum peserta didik dalam ruang digital. Temuan ini sejalan dengan kerangka digital citizenship yang dikemukakan oleh Choi (2016) dan UNESCO (2021), yang menempatkan

dimensi etika, partisipasi, dan kesadaran hukum sebagai inti kewargaan digital. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi tersebut menjadi lebih operasional ketika diinternalisasikan melalui struktur pedagogis PPKn yang berbasis nilai Pancasila.

Pada tahap perencanaan, pencantuman indikator literasi digital dalam RPP menunjukkan bahwa kompetensi digital diposisikan sebagai bagian integral dari capaian pembelajaran, bukan sekadar kompetensi tambahan. Hal ini konsisten dengan pandangan Ng (2012) dan Belshaw (2012) bahwa literasi digital mencakup aspek kognitif dan sosiokultural. Secara kritis, temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas integrasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi oleh keberanian guru mengonstruksi ulang tujuan pembelajaran PPKn agar relevan dengan konteks digital. Dengan kata lain, transformasi pedagogis menjadi faktor kunci, bukan semata transformasi teknologis.

Pada tahap pelaksanaan, pemanfaatan platform MoLeCul dan diskusi isu aktual—seperti hoaks, ujaran kebencian, dan keamanan data—mendorong peserta didik mengembangkan penalaran berbasis bukti. Temuan ini mendukung hasil Fraillon et al. (2019) dan Ribble (2015), tetapi juga memperlihatkan bahwa penguatan kewargaan digital lebih efektif ketika isu yang dibahas bersifat kontekstual dan dekat dengan pengalaman siswa. Sebagaimana dinyatakan Bråten et al. (2020), keterkaitan dengan realitas sosial memperbesar peluang terjadinya perubahan sikap. Dalam konteks ini, PPKn berfungsi sebagai ruang deliberatif yang

menghubungkan norma konstitusional dengan praktik interaksi digital sehari-hari.

Pada tahap evaluasi, proyek kampanye literasi digital menunjukkan pergeseran paradigma penilaian dari sekadar penguasaan konsep menuju performativitas nilai. Model evaluasi ini selaras dengan indikator digital citizenship menurut Mossberger, Tolbert, dan McNeal (2008), karena menilai partisipasi, tanggung jawab, dan kesadaran regulatif secara simultan. Secara analitis, pendekatan ini menegaskan bahwa pembentukan kewargaan digital memerlukan asesmen autentik yang memberi ruang refleksi dan produksi karya, bukan hanya tes kognitif.

Temuan penelitian ini juga beririsan dengan Nadhiroh et al. (2025), Kristiawan et al. (2025), serta Umamy, Abni, dan Izzah (2025) yang menekankan pentingnya media interaktif dan pembelajaran kontekstual dalam internalisasi nilai. Namun, studi ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam PPKn bukan sekadar strategi peningkatan motivasi belajar, melainkan strategi normatif untuk memperkuat karakter kewargaan digital berbasis Pancasila.

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan yang perlu dicermati. Penelitian ini dilakukan pada sekolah berbasis teknologi dengan dukungan infrastruktur digital yang relatif memadai, sehingga konteksnya belum tentu merepresentasikan sekolah dengan sumber daya terbatas. Selain itu, data bersumber dari pengalaman dan persepsi informan dalam rentang waktu tertentu, sehingga dampak jangka panjang terhadap

perilaku digital di luar sekolah belum dapat diukur secara komprehensif.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi guru PPKn di sekolah lain. Pertama, integrasi literasi digital perlu dirancang sejak tahap perencanaan dengan memasukkan indikator etika, verifikasi informasi, dan partisipasi digital dalam perangkat ajar. Kedua, pembelajaran hendaknya berbasis isu aktual agar peserta didik terbiasa menguji informasi secara kritis. Ketiga, evaluasi perlu diarahkan pada proyek autentik yang merefleksikan nilai tanggung jawab dan partisipasi, bukan semata-mata penguasaan materi. Integrasi tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah, termasuk melalui pemanfaatan platform sederhana yang tersedia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi literasi digital dalam PPKn berpotensi memperkuat dimensi kewarganegaraan digital peserta didik secara holistik apabila dilaksanakan secara sistematis dan berbasis nilai. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa adaptasi terhadap Society 5.0 dalam pendidikan kewarganegaraan bukan hanya soal digitalisasi pembelajaran, melainkan transformasi pedagogis yang mengaitkan kompetensi digital dengan karakter kebangsaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Telkom Malang terlaksana secara sistematis melalui perencanaan kurikuler,

pembelajaran berbasis isu aktual, serta evaluasi proyek reflektif digital yang didukung ekosistem teknologi sekolah, termasuk platform berbasis kecerdasan artifisial. Integrasi tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengakses dan mengelola informasi, tetapi juga memperkuat dimensi digital citizenship, meliputi etika bermedia, berpikir kritis, partisipasi digital konstruktif, dan kesadaran hukum di ruang siber. Temuan ini menegaskan bahwa literasi digital dalam PPKn efektif apabila diintegrasikan dengan pendidikan nilai Pancasila dan tanggung jawab kewarganegaraan. Untuk pengembangan selanjutnya, penelitian dapat diperluas melalui studi komparatif di sekolah dengan karakteristik berbeda, pengukuran dampak jangka panjang terhadap perilaku digital peserta didik di luar lingkungan sekolah, serta pengembangan dan uji model integrasi literasi digital berbasis nilai secara kuantitatif guna memperkuat validitas dan daya generalisasi temuan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Wisnuwardhana atas dukungan akademik dan fasilitasi yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan rekan di SMK Telkom Malang yang telah memberikan izin, akses data, serta kerja sama selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penulis menghargai kontribusi rekan sejawat dan lembaga afiliasi penulis yang telah memberikan masukan

konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Belshaw, D. (2012). The essential elements of digital literacies. <https://doug-belshaw.com>
- Bråten, I., Britt, M. A., Stærk, M., & Rouet, J.-F. (2020). Toward an integrative theory of text comprehension and digital literacy. *Educational Psychologist*, 55(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/00461520.2019.1709586>
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the Internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Frailon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T., & Duckworth, D. (2019). Preparing for life in a digital world: IEA international computer and information literacy study 2018 international report. Springer.
- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a new human-centered society. *Japan Spotlight*, 27(5), 47–50.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Status literasi digital Indonesia 2023.
- Kristiawan, I., Mukhlisin, M. I., Kustyarini, K., & Umamy, E. (2025). Penguatan nasionalisme melalui pengenalan tokoh sejarah di SDN 1 Kemantren Jabung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(1), 438–446. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i1.201>
- Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta gerakan literasi digital di Indonesia: Studi tentang pelaku, ragam kegiatan, dan kelompok sasaran. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 149–166.
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2008). *Digital citizenship: The Internet, society, and participation*. MIT Press.
- Nadhiroh, K., Farida, U., Mawadah, I. M., & Umamy, E. (2025). Penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui media interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar. *Adjektiva: Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 8(2), 49–58. <https://doi.org/10.30872/adjektiva.v8i2.5037>
- Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? *Computers & Education*, 59(3), 1065–1078. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.016>
- Oberle, M., Ivens, S., & Leunig, J. (2020). Digital citizenship education in civic education classrooms in Germany. *Journal of Social Science Education*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.4119/jsse-3497>
- Print, M., & Lange, D. (2013). *Civic education and competences for engaging citizens in democracies*. Sense Publishers.
- Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). ISTE.
- Sari, D. P., Rahmawati, Y., & Hidayat, R. (2022). Digital literacy in civic education learning: Challenges and opportunities. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 115–128.
- Umamy, E., Rizqi Nur Abni, S., & Izzah, A. (2025). Narasi lokal dalam buku cerita anak sebagai media internalisasi nilai demokrasi pada siswa sekolah dasar. *Ed-Humanistics: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 10(2), 77–85. <https://doi.org/10.33752/ed-humanistics.v10i2.10441>
- UNESCO. (2018). A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2. UNESCO Institute for Statistics.
- UNESCO. (2021). *Digital citizenship education: Handbook for educators*. UNESCO.